

Pesantren dan Pendidikan Perdamaian

Ulfa Masamah

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

e-mail: ulfamasamah@yahoo.com

DOI: 10.14421/jpi.2013.21.21-39

Diterima: 6 Februari 2013

Direvisi: 29 Maret 2013

Disetujui: 16 Mei 2013

Abstract

Surakarta was a city which had high intensity of religious social conflict that has to be managed as well as possible, transformed, and developed a peace. This research is about the roles of Pesantren of Al Muayyad Windan in which its capability to transform the conflict in Surakarta. The research findings showed that religious conflict transformation that could be done and based on the principle of the admission existence and the empowerment existence. The principles were based on the theology that was perceived and become as the motivation to do social changes, and developed the transformative Islam unto the multiculturalism.

Keywords: *Religious Conflict, Theology, Peace Education.*

Abstrak

Surakarta adalah kota yang memiliki intensitas konflik sosial keagamaan yang tinggi dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya, diubah, dan dibangun perdamaian. Penelitian ini tentang peranan Pesantren Al Muayyad Windan guna mengubah konflik di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi konflik agama dapat dilakukan didasarkan pada prinsip adanya penerimaan dan keberadaan pemberdayaan. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada teologi yang dipersepsikan dan dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan perubahan sosial, dan mengembangkan transformatif Islam dalam multikulturalisme.

Kata kunci: Konflik Agama, Teologi, Pendidikan Perdamaian

Pendahuluan

Secara historis, Surakarta atau Solo sering dikaitkan dengan kebangkitan nasionalisme, sosialisme dan berbagai gerakan keagamaan. Sejarah mencatat bahwa kota ini tidak hanya tempat munculnya berbagai peristiwa konflik politik antara Keraton dan kolonialisme Belanda, bahkan juga merupakan pusat nasionalisme. Selama seperempat awal abad ke-20. Solo dan kawasan sekitarnya menyaksikan kelahiran sejumlah kelompok-kelompok independen dan partai-partai politik, seperti Syarikat Islam, Insulinde, National-Indische Partij, PKI, dan Sarekat Ra'jat.¹

Konflik etnik merupakan wajah lain dari dinamika sosial Solo sebagai akibat dari fragmentasi sosial dan etnisitas di satu sisi, dan kesenjangan ekonomi, kekuasaan politik, serta perbedaan budaya dan agama, tingkat pendidikan dan lainnya. Hal ini bisa terlihat dari kenyataan bahwa di Surakarta dalam lima tahun terakhir setidaknya terjadi 32 kali konflik. Secara umum konflik tersebut berkaitan dengan isu ideologi, perbedaan agama dan keyakinan, kekerasan terhadap budaya dan isu moralitas.² Kerentanan konflik bernuansa agama tersebut muncul disebabkan adanya gesekan antar kelompok keagamaan, terjadinya kekeringan spiritual di masyarakat Surakarta, adanya segregasi sosial berdasarkan etnis, perebutan sumberdaya ekonomi dan terkikisnya nilai budaya Jawa.³ Berbagai kerentanan konflik keagamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Surakarta menyimpan potensi konflik yang besar dalam kehidupan sosial keberagamaannya.

Radikalisme Islam di Surakarta terus membentuk hubungan-hubungan sosial sebagaimana dicatat oleh banyak media internasional sejak kejatuhan Soeharto pada pada 1990-an. Sebagian organisasi massa Islam terlibat aktif dalam aksi-aksi sosial, seperti protes terhadap pendeta Wilson menuntut penutupan diskotik dan *night clubs* selama Ramadhan, menentang invasi Amerika Serikat ke Irak, dan menuntut penerapan syariah di Indonesia. Radikalisme Islam juga menjadi lebih bergaung setelah bom Bali pada 12 Oktober 2001. Surakarta dipandang sebagai lahan subur bagi penyemaian Islam radikal karena aktivitas mereka terkait dengan jaringan organisasi-organisasi seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan teroris internasional seperti KMMM (Kelompok Militer Muslim Malaysia). Para pelaku bom Bali dan beberapa tempat lain dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan pemimpin lokal Abu Bakar Ba'asyir yang memimpin pondok pesantren al-Mukmin Ngruki,

¹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Dinamika Radikalisme dan Konflik Bersentimen Keagamaan di Surakarta*, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* (10) November 2010:1

² SPEK-HAM, FKPI, LSM COMMITMENT, *Draf Naskah Akademik Mekanisme Penanganan Kekerasan Berbasis Agama di Kota Surakarta*, Agustus 2010, hlm. 13-17.

³ Dian Nafi, *Kerentanan Konflik di Soloraya* (Makalah dipresentasikan di FPLAG Surakarta, 20 Desember 2010)

dan imam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan terakhir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa radikalisme, baik yang berlatar belakang politik, sentimen etnik, hingga keagamaan, terus mewarnai sejarah Surakarta. Satu dekade terakhir melukiskan pengalaman berbagai konflik serius antara berbagai kelompok Islam dan konflik antaragama. Kerentanan konflik ini harus diupayakan solusinya, agar terbangun kehidupan damai di masyarakat Surakarta. Pekerjaan besar ini menuntut adanya kesadaran semua elemen masyarakat di Surakarta untuk terlibat, salah satu institusi sosial penting dan strategis guna menanamkan konstruks yang lebih bersimpati dan berempati terhadap keberadaan agama lain adalah pendidikan. Berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin⁴ bahwa, sudah saatnya institusi pendidikan dimanfaatkan sebagai tempat persembaian untuk menumbuhkan sikap egaliter terhadap keberadaan agama lain. Pesantren adalah tempat untuk mencetak kader "*faqih fi 'ulum al-din* dan *faqih fi mashalih al-ummah*."⁵ Pesantren Al Muayyad Windan merupakan salah satu Pesantren yang sejak tahun 1999 aktif mendorong proses transformasi konflik di masyarakat Surakarta salah satunya melalui pendidikan perdamaian. Program yang dilaksanakan oleh Pesantren Al Muayyad Windan secara umum merupakan prakarsa untuk pemampuan masyarakat agar bisa mengelola persoalannya sendiri. Dalam skala yang lebih luas program tersebut berupaya memperbaiki tata kuasa, tata kelola dan tata guna sumber daya yang dimiliki masyarakat Surakarta.

Berangkat dari latar belakang di atas tulisan ini difokuskan pada dua hal *pertama*, apa latar belakang pemikiran pendidikan perdamaian Pesantren Al Muayyad Windan, dan *kedua*, bagaimana model pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan di Surakarta.

Konflik Keagamaan di Kota Surakarta

Solo sering disebut sebagai kota bersumbu pendek dan mudah terbakar. Kota ini memiliki sejarah tiga abad konflik komunal. Yakni konflik sosial dan kekerasan sosial antara dua kelompok komunitas, di mana satu kelompok menjadi sasaran kekerasan dan amuk kelompok lainnya. Selama lima tahun terakhir di Surakarta telah terjadi 32 kali kekerasan berbasis agama. Dari kasus yang terjadi setidaknya terdapat lima tipe kasus yaitu; kasus idiologi, kasus perbedaan keyakinan, kasus kekerasan budaya, isu moralitas dan isu administrasi tempat ibadah.⁶ Bahkan dalam

⁴ Syamsul Arifin, "Kontruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia", HUMANITY, 3 (2) September 2009: 80 – 92

⁵ Sri Haningsih, "Peran Strategis Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam di Indonesia". El-Tarbawi, 1 (1) Juni 2008

⁶ Dalam isu idiologi ini para pelaku tindak kekerasan mengatasnamakan dirinya melawan idiologi

satu tahun terakhir di Surakarta terjadi beberapa kejadian yang memiliki potensi konflik, antara lain munculnya kasus penembakan dan penyerangan terhadap aparat kepolisian yang sedang bertugas.⁷

tertentu, misalnya, melawan ideologi komunis, ideologi pluralis dan lainnya. Contoh dari kasus ini adalah *pertama*, mengangkat kembali isu komunisme di Surakarta, seperti kasus 2006 dimana terjadi penyerangan dan penghentian Konferda Papernas DPD II Sukoharjo dan Surakarta. *Kedua*, pada tanggal 14 September 2009 sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Laskar Hizbullah mendatangi kantor Solo Radio, menuntut pernyataan maaf secara lisan dan tulisan pada manager SoloRadio yang memutar lagu genjer-genjer. *Ketiga*, penggrebekan dan pelarangan terhadap pembuatan film Lastri yang dikerjakan oleh Eros Djarot di pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu Karanganyar. Sedangkan berkaitan dengan isu perbedaan agama dan keyakinan, beberapa komunitas mensikapi perbedaan agama dan keyakinan dengan jalan kekerasan. Beberapa kasus dalam isu ini adalah; *pertama*, kasus yang terjadi di Gereja Santopetrus yang didatangi oleh kelompok yang mengatas namakan dirinya Jamaah Islam Surakarta. *Kedua*, sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar umat Islam Surakarta (LUIS) pada 21 Juni 2007 membubarkan seminar dialog antar agama di Surakarta yang dilakuka oleh Insan Emas, sebuah lembaga yang peduli terhadap pluralisme dan dialog antar agama di Surakarta.

Adapun isu kebudayaan dipicu oleh ketidaksukaan kelompok tertentu terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Beberapa kasus antara lain: *pertama*, pelarangan kegiatan Yasinan yang dilakukan oleh masyarakat Joyosuran oleh kelompok FPI. *Kedua*, pelarangan pada acara pernikahan yang menggunakan janur kuning (daun pohon kelapa yang masih muda) di Joyosuran yang dilakukan oleh FPI. *Ketiga*, penyegelan Pondok Wijaya Kusuma oleh sekelompok warga karena pondok tersebut diduga mengajarkan aliran sesat. *Keempat*, terjadi *sweeping* buku porno dan Majalah *Play Boy* yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di beberapa toko buku di Surakarta seperti Gramedia, TB Kharisma dan TB sekawan. *Kelima*, adanya himbauan MUI Surakarta untuk menarik peredaran buku "*Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam*" yang diterbitkan oleh Pusat Studi Budaya dan perubahan Sosial (PSB PS UMS) pada Juli 2009. Isu moralitas yang menimbulkan konflik berkaitan dengan berbagai kegiatan usaha hiburan yang diselenggarakan di Surakarta. Beberapa kasus dalam isu ini antara lain; *pertama*, ancaman *sweeping* terhadap berbagai tempat hiburan, kafe dan pertokoan yang buka selama bulan Ramadhan oleh MMI setiap tahunnya. *Kedua*, ancaman FPI akan merusak tempat tempat yang di sinyalir menjadi pusat kemaksiatan seperti penjualan minuman keras dan prostitusi di Surakarta. *Ketiga*, penutupan paksa tempat yang diindikasikan oleh FPI sebagai tempat penampungan PSK di Jl. Ronggowarsito, Jl. Styabudi, Jl. Ahamd Yani dan kawasan Titisari Surakarta. Sedangkan kasus administrasi rumah ibadah., antara lain kasus IMB GKAI Gebang Kadipiro Surakarta (2006), Kasus IMB GKJI Kristus Gembala, Serengan (2007), IMB GSJA Bukit Sion Serengan (2007), IMB GBI Kenteng Baru Pasar Kliwon (2007) dan IMB GPPS Mojosongo Jebres (2010). SPEK-HAM, FKPI, LSM COMMITMENT, *Draf Naskah Akademik Mekanisme Penanganan Kekerasan Berbasis Agama di Kota Surakarta*, Agustus 2010, hlm. 13-17.

⁷ Dalam rentang bulan Juli sampai Agustus tahun 2012 sudah terjadi empat kali aksi terror di kota Solo. *Pertama*, terjadinya penembakan di Pos Pengamanan Polisi Glembejan di Solo, Jawa Tengah yang mengakibatkan dua polisi terluka tepat pada hari kemerdekaan RI, 17 Agustus 2012. *Kedua*, pelebaran granat di pos penjagaam polisi di Gladag Solo pada tanggal 18 Agustus 2012. Dalam insiden tersebut granat tidak meledak dan tidak ada korban, namun cukup memberikan dampak teror. *Ketiga*, penembakan pada polisi yang bertugas di pos penjagaan di Matahari Singosaren solo pada kamis 30 agustus 2012. Dalam kejadian yang menewaskan seorang anggota polisi tersebut dilakukan oleh 2 orang bersepeda motor, dan dengan tenang menembak ke arah polisi yang berjaga di pos polisi. *Keempat*, baku tembak antara densus 88 dengan terduga teroris di jl Veteran Tipes, Solo yang terjadi pada 31 Agustus 2012. Dalam kejadian tersebut menewaskan seorang anggota densus 88 anti terror bernama Bripda Suherman dan 2 orang terduga teroris. Sedangkan seorang yang diduga teroris berhasil ditangkap pihak densus 88. Dari berbagai kejadian tersebut terlihat bahwa wilayah Solo raya merupakan ranah kontestasi perhelatan Islam radikal yang di dalamnya terdapat jaringan terorisme lokal, nasional maupun trans-nasional.

Benih-benih munculnya berbagai konflik berbasis agama di Surakarta tumbuh seiring dengan lahirnya gerakan politik keagamaan radikal dalam skala lokal maupun nasional. Kemunculan berbagai gerakan ini disebabkan adanya tuntutan terhadap perbaikan hidup rakyat kecil dan tumbuhnya kesadaran politik di tengah masyarakat Surakarta.⁸ Hal ini terlihat dari berbagai perlawanan masyarakat Surakarta yang berorientasi kepada gerakan radikal seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam (SI) dan Sarekat Rakyat (SR).

Berbagai bentuk radikalisme keagamaan ini terus berlanjut pasca kemerdekaan. Salah satunya adalah pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru yang ditandai dengan pergolakan politik di Surakarta yang terus memanas. Puncaknya adalah pada tanggal 6 November 1966, ketika terjadi kerusuhan etnis yang dibalut sentimen keagamaan. Kerusuhan ini mengakibatkan terjadinya perusakan toko-toko milik etnis Cina di kawasan Nonongan dan Coyudan Solo.⁹ Dengan modus yang sama, konflik tersebut terulang kembali pada tahun 1998. Meskipun sangat rumit, kerusuhan Mei di Surakarta juga bisa dikategorikan dalam konflik etnis-agama, hal ini dikarenakan adanya simbol keagamaan yang digunakan terutama pada upaya pendiskriditan warga keturunan Tionghoa.¹⁰

Surakarta juga menjadi tempat suburnya berbagai gerakan radikal berbasis agama. Organisasi tersebut antara lain MMI, MTA, FPIS, Laskar Jundullah, Hisbullah dan FKAM.¹¹ Organisasi tersebut memiliki pandangan keagamaan yang

⁸ Beberapa faktor yang mendorong adanya gerakan radikalisisasi di Surakarta antara lain: (1) adanya kemiskinan struktural pada masyarakat pedesaan tidak dapat diatasi dengan kebijakan reorganisasi agraria maupun kebijakan reorganisasi administrasi pemerintahan. (2) Semakin kuatnya gerakan politik Islam dalam masyarakat, hlm ini ditambah dengan adanya aliran lain seperti nasionalis, sosialis dan marxis yang turut mendorong radikalisisasi masyarakat pedesaan. (3) Masing-masing aliran tersebut bergerak sendiri-sendiri bahkan arah politiknya tidak jarang saling berlawanan. Lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986) hlm. 60.

⁹ Latar belakang politik peristiwa tersebut adalah rasa ketidaksukaan terhadap etnis Cina karena dituduh mendukung Gerakan 30 September 1965. Sebelum peristiwa 6 November 1966, sejumlah teror dilakukan oleh anggota PKI terhadap umat Islam di Notosuman. Akibatnya ormas Islam seperti PSII, Al Irsyad, Al Islam, HSBI, PMII, HMI, Wanita Islam, Muhammadiyah, Gasbindo menuntut agar etnis Cina yang tergabung dalam BAPERKI yang mendukung gerakan PKI diadili. Konflik ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan, penjarahan, pembakaran dan penghilangan orang yang saat itu dituduh sebagai anggota PKI.

¹⁰ Kondisi yang sangat dominan dari konflik di Surakarta yaitu; *pertama*, adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dan Pribumi yang masih sedikit jembatannya. Hlm ini diperkeruh dengan komunikasi antar etnik sangat jarang, yang ada hanya relasi sebagai majikan dan pembantu, penjual dan pembeli. *Kedua*, ketidakpedulian pemerintah terhadap asimilasi dan akulturasi keberagaman budaya dan agama menjadi multikultural. Persepsi yang berbeda yang disebabkan perbedaan budaya dan tidak terjadinya dialog di dalamnya. *Ketiga*, dialog agama dan budaya yang ada masih semu dan pada permukaan saja. Lihat MT.Arifin dkk, *Kapok Jadi Non Pribumi; Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman, 1998), hlm.73

¹¹ Zainudin Fanani, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press dan Asia Foundation, 2002), hlm. 5

eksklusif, tertutup dan *scripturalis*. Paham eksklusifisme ini memiliki kecenderungan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat disebabkan dua hal yaitu *pertama*, sikap intoleran mereka terhadap pandangan atau ajaran yang berbeda dengan pemahaman dan ajaran kelompok mereka. *Kedua*, kecenderungan dari paham ini adalah membentuk kelompok kecil yang menjadi alat organisasi yang biasanya bersifat paramiliter.¹²

Horace M. Kallen mengidentifikasi komunitas Islam ini dengan empat ciri khusus yaitu, *pertama*, mereka memperjuangkan Islam secara *kaffah* (totalitas), yakni syariat Islam sebagai hukum negara, dasar negara, sekaligus Islam sebagai sistem politik. Oleh karenanya, demokrasi ditolak karena dianggap bukan dari ajaran Islam. *Kedua*, mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah kurun waktu kehidupan nabi, sahabat dan tabi'in (*salaf*). *Ketiga*, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi; *Keempat*, perlawanannya dengan gerakan liberalisme Islam yang sedang berkembang di Indonesia, dengan segala percabangan keyakinannya seperti pluralisme misalnya.¹³

Doktrin utama kalangan yang memiliki paham eksklusifisme ini adalah Islam *kaffah*. Dalam doktrin ini, Islam tidak hanya diajarkan sebagai sistem agama akan tetapi sebagai sistem yang secara total mengatur seluruh aspek kehidupan kemanusiaan, baik dalam kehidupan pribadi amupun kehidupan sosial. Dalam konteks dunia sekarang, paham ini berpegang teguh pada pola integralisme, yakni relasi antara agama dan negara bersifat integral atau saling mengisi. Disini Islam dipahami sebagai *din wa daulah* atau agama dan negara.¹⁴

¹² Kelompok ini memiliki kecenderungan bersikap intoleransi, termasuk juga dalam persoalan idiologi negara. Bruce A. Robinson menyebut kekerasan agama dengan istilah *religious intolerant*. Ia membuat kategori mengenai bentuk-bentuk tindakan "*religious intolerance*" agaknya bisa membantu untuk melihat bentuk-bentuk intoleransi, antara lain; *pertama*, penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meskipun ketidakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki. *Kedua*, Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku immoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya. *Ketiga*, Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut. *Keempat*, Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka. *Kelima*, Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi. *Keenam*, mendevalusi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat. *Ketujuh*, Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka. Bruce A. Robinson dalam <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#def>. [18 November 2009]

¹³ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 35

¹⁴ Doktrin idiologi ini di dasarkan pada Q,S Al Baqoroh, (2): 208. Menurut idiolog eksklusifisme ini, Said Qutb, mengatakan bahwa kata *As sikh* adalah umat beriman yang diperintahkan untuk memasukinya dengan *al manhaj ar arabani* yang membawa kedamaian. *Al manhaj ar arabani* sering diperlawankan dengan *manhaj al jahilli* yaitu pola kehidupan sekuler yang diciptakan manusia.

Paradigma gerakan tersebut bertolak belakang dengan gerakan yang lebih substansialis, terutama usaha menjadikan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Kelompok ini menginginkan Islam harus bisa menjadi instrumen untuk melakukan kerja-kerja kebangsaan bersama dengan kekuatan masyarakat lainnya. Selain itu, kalangan Islam substansialis mencoba melakukan dekonstruksi terhadap wacana ke-Islaman, yang semula berorientasi kepada normativitas Arabisme menjadi Islam yang berwajah Indonesia (pribumisasi Islam). Misalnya, gagasan pribumisasi Islam ini dipahami sebagai sebuah usaha membuat sintesa yang memungkinkan antara Islam dengan budaya lokal masyarakat (*genius locally*) Indonesia.¹⁶

Kondisi di Surakarta, dengan berbagai varian gerakan keagamaannya dalam konteks kebangsaan setidaknya ini bisa dibaca bahwa Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan dilihat tidak lagi mampu menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat sudah terasing dari empat pilar kebangsaan tersebut, sehingga kesadaran dalam berbangsa dan bernegarapun rendah.

Pendidikan Perdamaian di Pondok Pesantren Al Muayyad Windan Surakarta

Pesantren Al Muayyad Windan Surakarta

Pesantren Al Muayyad Windan merupakan cabang dari Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Pendirian Pesantren Al Muayyad Windan merupakan bagian dari pengembangan Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Pondok Pesantren Al-Muayyad Cabang Windan Makamhaji Kartosura Sukoharjo berdiri Ahad, 7 Jumadil Akhir 1417 H/20 Oktober 1996 M. Lokasi Pondok Pesantren ini di dukuh Windan RT 02, RW 08 No. 12 Desa Makamhaji Kecamatan Kartosura Kabupaten Sukoharjo.

Pesantren Al Muayyad Windan merupakan cabang ke-5 yang diselenggarakan sebagai Pesantren pengembangan masyarakat berbasis Pesantren mahasiswa dari Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. PP Al-Muayyad Cabang

¹⁵ Polarisasi gerakan keagamaan tersebut secara umum terdapat tiga arus besar dalam Islam Indonesia. *Pertama*, menginginkan legalitas politik Islam dalam sistem negara. Kelompok ini dikenal dengan kelompok simbolis, yakni berpegang pada model legalitas simbol-simbol Islam. *Kedua*, kelompok yang menolak masuknya sistem Islam dalam negara, namun merasa perlu memasukan etos atau spirit Islam dalam mendasari sistem negara. Kalangan ini dikenal dengan kelompok substansialis. *Ketiga*, adalah kelompok yang membedakan antara kawasan pribadi dan publik dalam kenegaraan. Agama adalah wilayah pribadi yang tidak dapat dicampurkan dalam sistem publik, negara. Kelompok ini kemudian dikenal dengan kelompok liberal. Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 386

¹⁶ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 149-150

Windan adalah Al-Muayyad ke-5 setelah cabang–cabang di Tegowanu Grobogan, Tirtomoyo Wonogiri, Papahan Tasikmadu Karanganyar dan Mondokan Sragen. Pesantren Al Muayyad Windan didirikan berdasarkan surat keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Al Muayyad Surakarta nomor 188/YLPA/O/VII tahun 1995 tentang pendidiran Pondok Pesantren Al Muayyad Windan di Makamahaji, Kartasuro, Sukoharjo. Keputusan ini disusul oleh keputusan SK Nomor 203/YLPA/P/V.1996 tanggal 25 Mei 1996 tentang pengangkatan KH. Drs. M. Dian Nafi sebagai pengurus Pesantren Al Muayyad Windan. Badan Hukum pondok Pesantren ini adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Al Muayyad Surakarta dengan Akte Notaris Budi Maknawi, SH Nomor 44/21 november 198. Lihat Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al Muayyad Windan, ditetapkan 23 Agustus 2007 M/10 Sya'ban 1428 H di Windan, Makamahaji Kartasura, Sukoharjo.

Pesantren Al Muayyad Windan didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan pengembangan Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Visi yang dikembangkan Pesantren Al Muayyad Windan adalah terwujudnya masyarakat religius Indonesia yang beradab, berkeadilan, saling menghormati, dan bermartabat.¹⁷ Berangkat dari visi tersebut pola pendidikan di pesantren ini bertumpu pada pendidikan partisipatif, dengan menganut model pendidikan yang berbasis andragogis.¹⁸

Memahami Pendidikan Damai di Pesantren Al Muayyad Windan

Konflik merupakan persoalan yang umum dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia pasti tidak akan terlepas dari konflik dalam kehidupannya dengan beragam kepentingan.¹⁹ Konflik akan membawa pada kemunduran kehidupan bermasyarakat ketika tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi, konflik akan menjadi

¹⁷ Abu Choir, "Model Pengembangan Kurikulum Terpadu di Pesantren Mahasiswa Al Muayyad Windan Sukoharjo", *Al Hikmah*, 7 (1) Juli 2009: 46

¹⁸ Metode andragogi adalah sebuah metode yang meletakkan posisi antara pendidik dan peserta didik pada posisi yang sama-sama di pandang memiliki pengalaman dan pengetahuan. Model andragogis yang diterapkan sebagai metode pendidikan di Pesantren Al Muayyad Windan detail pelaksanaannya adalah *pertama*, pembelajaran dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ke pesantrenan lebih di arahkan pada pola partisipatif dalam daur aksi dan refleksi. *Kedua*, pendekatan subjek belajar lebih diutamakan dari pada pendekatan silabi (muatan kurikulum), sehingga keaktifan santri lebih menentukan keberhasilan belajar dari pada muatan kurikulum terstruktur dan peranan ustad atau ustadzah. *Ketiga*, muatan kurikulum tidak menentukan sebelum program berjalan, melainkan ditemukan oleh subjek belajar sendiri melalui kelompok dinamik. *Keempat*, ustadz-ustadzah dipilih oleh santri dengan prinsip siapapun dapat menjadi ustadz-ustadzah dalam hlm tertentu dan menjadi santri dalam bidang yang lain, demikian pula pelatihan dan pengelolaan Pesantren. *Kelima*, ustadz dan ustadzah bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi santri dalam belajar mendidik sendiri dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Lihat, Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al Muayyad Windan, ditetapkan 23 Agustus 2007 M/10 Sya'ban 1428 H di Windan, Makamahaji Kartasura, Sukoharjo

¹⁹ Dian Nafi', *Memimba Kearifan Masyarakat* (Yogyakarta: Amwin Institute-Pustaka Pesantren, 2004) hlm. 199

potensi yang berguna mendinamiskan masyarakat jika dikelola dengan baik. Bukan hanya meningkatkan kerukunan saja, tetapi juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya membangun masyarakat yang beragam.²⁰

Pesantren Al Muayyad Windan sebagai komunitas yang memiliki kepedulian besar pada pengembangan perdamaian secara aktif menyelenggarakan berbagai program berkaitan dengan pendidikan perdamaian. Secara umum program tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk bisa hidup damai dalam keragamannya. Pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad antara lain:

1. Pelatihan Manajemen Konflik

Sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 Pesantren Al Muayyad Windan bersama FPLAG aktif menyelenggarakan pelatihan manajemen konflik dan mediasi konflik. Adapun kegiatan ini bertujuan: (1) membangun kesiapan sosial dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola persoalan konfliktual mereka secara mandiri. (2) Dengan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat menyadari pentingnya menyelesaikan konflik dengan jalan menghindari kekerasan.²¹

Model pendidikan perdamaian yang diselenggarakan oleh Pesantren Al Muayyad Windan ini adalah model pendidikan populer. Pendidikan populer adalah pendidikan yang berlangsung di masyarakat, yang berlangsung sehari-hari untuk memperbaiki nasib masyarakat. Pendidikan seperti ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi nyata di masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk melatih orang untuk menjadi pelajar dari pengalamannya sendiri.²²

2. Pendidikan perdamaian dikalangan remaja dan pemuda

Program pendidikan perdamaian dikalangan remaja dan pemuda dilakukan melalui program *peace tach*. Program ini dilaksanakan pada bulan Juni 2006, dengan tema *on being a young Indonesian muslim*. Program ini bertujuan: (1) membangun pemahaman mengenai perdamaian di kalangan remaja dan pemuda di Surakarta dan sekitarnya, (2) Menciptakan keberlanjutan kegiatan dan peranan pemuda dalam pengembangan perdamaian agar menghasilkan saling pengertian, mengurangi rasa kecurigaan dan prasangka antara generasi muda Islam, (3) Tujuan jangka panjangnya adalah untuk pengembangan perdamaian di surakarta dimasa depan.²³

²⁰ Albert Fiadjoe, *Alternative Dispute Resolution: Developing Word Perspective* (London: Covendish Publishing Limited, 2004) hlm. 9

²¹ Laporan Kegiatan Pelatihan Perdamaian FPLAG tahun 2007

²² Mansour Faqih, *Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan Metode Kritis Transformatif* (Yogyakarta: INSIST Press, 2004) hlm. 30

²³ Dalam kegiatan ini Pesantren Al Muayyad Windan hendak mempromosikan perdamaian, toleransi

3. Pendidikan perdamaian pada warga Kelurahan Joyosuran Surakarta

Pendidikan perdamaian bagi warga Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta ini bertujuan; (1) Mendorong masyarakat agar memiliki prakarsa mengelola damai dalam kehidupan sosialnya,²⁴ masyarakat didorong kesadarannya untuk mensikapi konflik secara wajar dan mencari solusinya. (2) Memampukan masyarakat dalam memahami konflik.²⁵

Pendidikan perdamaian yang diselenggarakan selama tahun 2009-2010, pesantren Al Muayyad Windan berhasil mendorong masyarakat melakukan identifikasi penyebab konflik Kelurahan Joyosuran. Hasil identifikasi tersebut adalah; (1) adanya pemahaman keagamaan yang sempit. (2). Tidak ada ketegasan dari pihak aparat yang berwenang untuk mengendalikan kelompok-kelompok yang sering melakukan kekerasan dan intimidasi. Berangkat dari penyebab Konflik di atas masyarakat Joyosuran kemudian membangun kesepakatan penyelesaian permasalahan yang ada di antara mereka. Dari pendidikan perdamaian tersebut, harapannya dapat menjadi modal masyarakat untuk lebih mampu mengelola konfliknya sendiri. Puncaknya adalah dihasilkannya piagam perdamaian Joyosuran.²⁶

4. Pengembangan perdamaian melalui pendirian lembaga.

Strategi lain yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan adalah dengan mengembangkan lembaga yang difasilitasi oleh Pesantren Al Muayyad Windan, kemudian lembaga tersebut dimampukan dan berdiri sendiri. Lembaga tersebut memiliki visi dan misi yang diturunkan dari visi besar Pesantren Al Muayyad Windan. Beberapa lembaga tersebut adalah:

- a) PATIRO (Pusat Telaah Informasi Regional) Surakarta. PATIRO didirikan sebagai kepedulian dari Pesantren Al Muayyad Windan terhadap lemahnya daya tawar masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kota Surakarta. Dalam pelaksanaan programnya, PATIRO melakukan diskusi, seminar,

dengan teknologi, menciptakan duta perdamaian yang terorganisir dan berkelanjutan, meningkatkan keahlian pengelolaan kegiatan perdamaian menggunakan teknologi dan meningkatkan kaum muda Islam untuk perdamaian. Laporan Kegiatan *Peace Tach* Pesantren Al Muayyad Windan tahun 2006.

²⁴ Ade Irman Susanto, Laporan hasil kajian dan pemetaan Resiko Konflik di Kelurahan Joyosuran oleh Tim FKPI (Ade Irman Susanto, S. Pd, Macro Budi Santosa, S. Pd, Adhi Daan Basmono, S. Si. Theo, Adi Setyawan, S.E) yang disampaikan dalam Seminar *Perdamaian dan Konflik* di Joyosuran, Tanggal 28 Agustus 2009 di Hotel Indah Palace Solo.

²⁵ Hasilnya adalah kesadaran bahwa kekerasan muncul di Kelurahan Joyosuran karena arus manusia tinggi, arus modal tinggi, arus informasi timpang, arus kepentingan tinggi, arus pertumbuhan tinggi, kaya sumberdaya alam, daerah perlintasan, daerah penyangga dan adanya tata kuasa, tata kelola, dan tata guna yang tidak adil. Lihat Ade Irman Susanto, Laporan hasil kajian.....tanggal 28 Agustus 2009.

²⁶ Hasil wawancara dengan P. Hendri Ketua Forum Komunikasi Warga Joyosuran tanggal 20 Mei 2011.

lokakarya dan pendampingan yang terfokus pada kebijakan publik dan kebijakan anggaran. Disamping itu PATIRO juga membangun jejaring dengan lembaga lainnya yang memiliki fokus program pengawasan kebijakan publik dan kebijakan anggaran.²⁷

- b) Pusat Studi Perempuan (PSP). Pertimbangan didirikan Pusat Studi Perempuan (PSP) adalah untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan kegiatan di Pesantren Al Muayyad Cabang Windan. Lembaga ini memiliki program diskusi, seminar, workshop, dan advokasi perempuan. Beberapa materi dari diskusi yang dilaksanakan adalah hak-hak reproduksi perempuan, penafsiran teks ayat suci yang bias gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu PSP juga mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) untuk persemaian perdamaian semenjak dini.²⁸
- c) Komunitas Potlot. Komunitas Potlot berawal dari peserta workshop menulis kreatif pada bulan Agustus 2010, yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat wadah bersama untuk saling belajar dan mengembangkan kreatifitas. Kegiatan komunitas ini adalah diskusi-diskusi dan workshop yang membangun kreatifitas anak muda yang tidak di dapat di sekolah formal.²⁹
- d) Al Muayyad Windan *Emergency Response* (AMWINER). Berdirinya AMWINER ini di latarbelakangi bahwa sejak 1999 para santri dan guru Pesantren Al-Muayyad Windan belajar penanggulangan bencana alam di berbagai pusat studi, universitas dan LSM, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini diperkaya dengan pengalaman lapangan diperoleh dari bencana kerusuhan Ambon, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Madura. Pengalaman itu diperoleh lewat keikutsertaan warga Pesantren ini sebagai relawan di daerah-daerah bencana tersebut. Hasilnya dikaji

²⁷ PATTIRO Surakarta didirikan pada 04 April 2001, telah dicatatkan pada Notaris Sunarto S.H. dengan Akta no. 25 tertanggal 12 Juli 2004. PATTIRO Surakarta saat ini beralamat di Sodipan Rt 08 Rv V Pajang, Surakarta 57146. Telp. (0271) 7085058 faks. (0271) 726288. PATTIRO Surakarta melibatkan diri dalam kerja-kerja penelitian, pengelolaan informasi, pelatihan serta penerbitan dan pengembangan partisipasi masyarakat daerah dalam tema besar Kebijakan Publik Daerah. Kegiatan tersebut meliputi: pengkajian informasi regional, advokasi dan distribusi informasi. Lihat www.patiro_ska.com diakses tanggal 10 Mei 2011.

²⁸ Hasil wawancara dengan Kyai Dian Nafi tanggal 10 Mei 2011

²⁹ Pembelajaran yang didapatkan dari program Komunitas Potlot adalah (1) komitmen yang kuat dari seorang pimpinan komunitas membangun semangat dan motivasi yang kuat dari anggota. (2) Menggabungkan dari siswa yang berada dalam pondok Pesantren (hari libur nya jumat) dengan siswa luar Pesantren (hari libur nya Minggu) harus dapat menemukan jadwal yang tepat agar dapat pertemuan. (3) Memberikan keluluasaan pemimpin komunitas untuk dapat memimpin dan belajar memimpin membuat pemimpin komunitas termotivasi untuk mengimplementasikan idenya sebagai pemimpin. (4) Belajar tentang toleransi, pluralitas dan multikultur tidak selalu membahas tentang itu akan tetapi berinteraksi langsung dengan yang berbeda telah menciptakan pembelajaran toleransi, pluralitas dan multikultur. Hasil wawancara dengan Ade Irman Susanto tanggal 19 April 2011.

dan sebagian dipadukan untuk memperkaya muatan pelatihan-pelatihan di dalam Pesantren.³⁰

Adapun berbagai kegiatan Pesantren Al Muayyad Windan dalam pengembangan demokrasi dan toleransi antara lain: pendidikan perdamaian bersama PSPP (Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian) UKDW Yogyakarta, program pengembangan dan rekonsiliasi yang diselenggarakan bersama dengan P3RI (Pusat Pengembangan dan Rekonsiliasi Indoneisa) UII Yogyakarta, program pendidikan damai dilaksanakan bersama PSKP (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian) UGM Yogyakarta, pembentukan TIRA (Tim Independen Untuk Rekonsiliasi Ambon) Maluku.³¹

Berbagai kegiatan tersebut merupakan upaya Pesantren Al Muayyad Windan untuk menanamkan kesadaran hidup damai dalam masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat Surakarta lebih dewasa dalam mensikapi berbagai konflik yang ada. Misalnya berkaitan dengan kenyataan adanya gerakan Islam fundamentalis di Surakarta, diharapkan masyarakat bisa menilai dan mencari akar penyebab mengapa mereka menjadi fundamentalis.³²

Pendidikan Sebagai Proses Penayadaran

Pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran akan kehidupan yang damai di Surakarta. Hal ini terlihat dari pernyataan Kyai Dian Nafi' bahwa pendidikan merupakan sarana pewarisan nilai-nilai luhur secara damai. Menurut Kyai Dian Nafi' terdapat lima alasan penting mengapa pendidikan harus disertakan dalam pembahasan pembangunan perdamaian (*peace building*). *Pertama*, pendidikan merupakan wahana partisipasi warga negara ke dalam pendidikan. *Kedua*, pendidikan merupakan wahana warga negara untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. *Ketiga*, pendidikan merupakan wahana mobilitas sosial vertikal yang terbuka dan damai. Warga negara bukan dari kalangan kaya dapat memasuki kelas menengah melalui pendidikan. *Keempat*, pendidikan merupakan wahana pembentukan karakter masyarakat melalui pewarisan dan pengembangan nilai-nilai luhur komunitas. *Kelima*, pendidikan merupakan wahana individuasi, yaitu upaya membangun warga belajar sebagai pribadi yang dapat memikul tanggung jawab sosial, budaya, politik dan hukum.³³

30 Sejumlah santri yang berkualifikasi sebagai relawan dan *community organizer* telah dihasilkan dari pembelajaran selama satu dasawarsa itu. Sebagian dari mereka telah bekerja bersama-sama masyarakat dan NGO dari berbagai latar belakang untuk program-program pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan perdamaian. Refleksi atas pergumulan itu meyakinkan kami untuk ikut memperkuat barisan penanggulangan bencana di Indonesia dengan membentuk Amwin *Emergency Response*. Hasil wawancara dengan Kyai Dian Nafi' tanggal 10 Mei 2011.

31 Muhammad Ishom, *A Case Study of Models of Inter Religious Dialogue at Pesantren Al Muayyad Windan Solo* (Yogyakarta: Tesis PPS UGM, 2006) hlm. 34

32 Hasil wawancara dengan Al Munawar ketua FPALG Surakarta tanggal 25 April 2011

33 Dian Nafi', *Menimba Kearifan Masyarakat...* hlm. 224

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan perdamaian yang dilakukan Pesantren Al Muayyad Windan bertujuan agar masyarakat berdaya dengan kemampuannya sendiri, tanpa tergantung dengan pihak dari luar. Lisa Schirch mengatakan bahwa dengan mampu mengelola persoalannya sendiri maka masyarakat akan bisa membuat keputusan-keputusan yang independent, lebih memiliki ketahanan dan tidak mudah terpengaruh oleh kondisi sosial politik yang berkembang.³⁴

Implikasi dari pemberdayaan masyarakat ini adalah terbangunnya ruang publik di masyarakat. Kata kunci dari ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam aktualisasi diri tersebut. Sehingga dalam konteks politik ruang publik dapat dipahami sebagai ruang untuk warga negara yakni individu bukan sebagai anggota ras, agama atau etnis, tetapi sebagai rakyat. Dengan program pemberdayaan ini keberadaannya Pesantren Al Muayyad Windan tidak terpisah dari masyarakat. Pondok Pesantren bisa belajar dari masyarakat sebab masyarakat menjadi laboratorium bagi Pesantren. Sebaliknya masyarakatpun belajar dari Pesantren Al Muayyad Windan mengenai berbagai inovasi sosial.³⁵

Pemberdayaan yang dilakukan yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad melalui berbagai pelatihan dan pendirian PATIRO, AMWINER dan Komunitas POTLOT terlihat sebagai usaha mendorong masyarakat untuk bisa melakukan refleksi dari pengalaman yang mereka alami. Menurut Mansur Faqih, dengan model ini masyarakat didorong mengenali masalahnya sendiri yang kemudian mendorong kesadaran mereka untuk melakukan aksi nyata. Oleh sebab itu proses pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus yaitu pelajar, pengajar dan realitas yang dihadapi.³⁶ Dalam hal ini partisipasi basis komunitas merupakan sesuatu yang tidak bisa di tinggalkan, karena pola ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menolong komunitas masyarakat yang lemah. Penekanan partisipasi di sini menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi harus melalui proses keterlibatan seluruh komunitas yang terlibat dalam pengorganisasian.³⁷

³⁴ Lisa Schirch, *Strategis Peace Building*, (USA; Goodbook, Intercourse PA. 17534), hlm. 51

³⁵ Hlm ini sejalan dengan Pondok Pesantren Pabelan Magelang Jawa Tengah KH. Hamam Ja'far. KH. Hamam Ja'far mengatakan bahwa Pondok Pebelan menjadi sebuah masyarakat belajar dengan fungsi: (1) Sebagai pusat informasi, dimana pondok menjadi lembaga pendidikan masyarakat merupakan narasumber, baik dibidang keagamaan maupun kemasyarakatan. (2) Pusat belajar dimana para santri dari desa sekitar pondok Pesantren maupun yang datang dari berbagai daerah untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengajaran dalam sistem pondok Pesantren. (3) Pusat pelatihan ketrampilan dimana masyarakat terutama pemuda desa bersama santri dibekali ketrampilan melalui progam yang dadakan oleh Pesantren. (4) Bengkel kerja untuk para santri maupun masyarakat sekitar. Pondok Pesantren memberikan tempat pertukangan, bengkel, elektronik dan lainnya. (5) Pusat pengembangan masyarakat. Sejak didirikannya pondok Pesantren Pabelan selalu berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Lihat Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baidhowi (peny.), *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Islam Indonesia*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 165-171

³⁶ Mansour Faqih, *Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan Metode Kritis Partisipatoris* (Yogyakarta: INSIST Press, 2004) hlm. 37

³⁷ Pemberdayaan melalui pendidikan perdamaian yang dilakukan Pesantren Al Muayyad Windan juga

Dari aktivitas pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan sebagaimana disebutkan di atas terlihat arahnya adalah: (1) agar masyarakat terlibat secara aktif, maka isu yang diangkat hendaknya bersentuhan langsung dengan kebutuhan mereka. (2) Pengorganisasian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan terlihat sebagai upaya memihak pada kelompok yang lemah dan termarginalkan. Hal ini terlihat bahwa pengorganisasian dirancang secara partisipatoris untuk mendorong komunitas masyarakat agar menjadi komunitas yang kritis dan bertanggung jawab terhadap persoalan mereka sendiri. (3) sifatnya *problem solving*. Artinya pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan ini merupakan upaya pemampuan masyarakat untuk kreatif mencari solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi. (4) Pola pendidikan yang dilakukan berbasis kesetaraan sehingga tidak ada dominasi dalam pendidikan ini.

Pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan merupakan prakarsa untuk meningkatkan keadilan dan menurunkan kekerasan di masyarakat. Hal ini terlihat dengan jelas dari pernyataan Kyai Dian Nafi' mengenai reduksi kekerasan di Masyarakat. Kyai Dian Nafi' mengatakan bahwa ikhtiar meminimalkan kekerasan bisa dilakukan melalui beberapa cara antara lain: *pertama*, dialog antar agama perlu di intensifkan baik pada tataran pembelajaran bersama maupun aksi bersama. *Kedua*, kajian sejarah kritis yang mendukung pemberdayaan rekonsiliasi. Hal ini bertolak dari asumsi bahwa kekerasan komunal yang besar di tanah air di kawatirkan menghapus kenangan masa lalu yang diwarnai dengan toleransi antar agama. *Ketiga*, program pemberdayaan rekonsiliasi untuk mamampukan masyarakat terutama tokoh-tokoh dalam mengelola konflik dengan sebaik-baiknya tanpa kekerasan. *Keempat*, mencegah terjadinya pandangkalan agama dengan menitik beratkan keberagaman dari pada formalisme agama.³⁸

Di sinilah proses pendidikan sebagai media penyadaran yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan ini sejalan dengan konsep pendidikan pembebasan Paulo Freire. Sistem pendidikan yang dikemukakan Freire merupakan sistem pendidikan yang menggunakan pendekatan dialogis. Model ini berusaha menempatkan subjek pendidikan sebagai manusia yang memiliki jati diri dan perlu berkembang secara bersama-sama.³⁹ Dengan dialog masyarakat di mampukan untuk mengubah

mencerminkan aksi-refleksi yang progresif. Kondisi ini menekankan adanya kesiapan, disiplin dan keterlibatan sebanyak mungkin masyarakat. Mereka melakukan identifikasi, klarifikasi dan menentukan putusan. Proses tersebut merupakan proses yang terus berkesinambungan. Lihat Elliyasa KH Darwis, *Pengorganisasian Aksi Komunitas dan Kuliah Kerja Nyata*, (Jakarta, Dirjen diktis kemenag RI, 2004), hlm. 8

38 Dian Nafi', *Menimba Kearifan Masyarakat* .hlm 185-186. Lihat juga Sartono Kartodiharjo, *Idiologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa; Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosiokultural* (Jakarta: Pabelan Jayakarta, 1999) hlm. 18

39 Abdullah Faisal dkk, *Metode dan Teknik*... hlm. 175

suatu realitas secara bersama-sama dengan orang lain, bukan orang lain yang harus dirubah. Model dialogis ini menuntut adanya keterlibatan setiap elemen masyarakat untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Dialog ini bisa berjalan dengan baik jika masing-masing peserta dialog adalah orang yang memiliki kesadaran kritis dalam melihat persoalan yang mereka hadapi dan kemudian bersedia untuk membicarakan penyelesaian persoalan tersebut. Tanpa adanya kesadaran kritis masyarakat akan sangat sulit memecahkan persoalan yang dihadapi.⁴⁰

Menurut Freire tugas pendidikan adalah melakukan *conscientizacao* atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas yakni suatu sistem dan struktur yang memarginalkan persoalan kemanusiaan. Freire membagi kesadaran manusia itu dalam tiga kesadaran yaitu kesadaran megis, naif dan kritis. Dalam kesadaran ini tugas paradigma kritis adalah memberi ruang bagi masyarakat agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja. Dengan kesadaran kritis tersebut persoalan yang ada didialogkan untuk dicari solusinya. Dengan kesadaran kritis ini dialog akan menghasilkan penyelesaian persoalan bisa bertahan lebih lama. Di sinilah dialog diasumsikan tidak hanya sekali jadi akan tetapi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.⁴¹

Pengembangan Islam Transformatif

Pendidikan damai yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan melalui berbagai programnya sebagaimana disebutkan di atas terlihat mengarah pada upaya pengembangan demokrasi yang lebih substantif. Demokrasi substansialis ini dimaknai sebagai demokrasi yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan moralitas, kesetaraan, keadilan, serta kebebasan sipil dan hak azasi manusia. Hal ini terlihat dari berbagai program yang dilaksanakan oleh PATIRO Surakarta dan AMWINER. Dengan model demokrasi yang lebih substantif tersebut diharapkan bisa menjadi landasan pijak kemajuan bagi seluruh elemen masyarakat Surakarta. Selain itu, juga diharapkan akan terbangun suatu masyarakat yang komunikatif, yang dicirikan dengan adanya konsensus, kesetaraan, saling memahami dan adanya kesediaan untuk berdialog.

Dengan mengedepankan demokrasi substantif Pesantren Al Muayyad Windan terlihat berusaha mengembalikan makna berbangsa dan bernegara kepada jati dirinya yaitu sebagai sarana membangun keadilan dan kemakmuran masyarakat. Kekuasaan bukanlah milik sekelompok orang saja akan tetapi menjadi jejaring kepentingan dari seluruh elemen masyarakat.⁴² Kekuasaan harus diwujudkan dalam norma yang

⁴⁰ Mansour Faqih, *Pendidikan Populer...* hlm 37-39

⁴¹ *Ibid.*, hlm 28-30

⁴² Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan; Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Focult", *Basis* 12 (51) Januari 2002; 12

mengedepankan keterbukaan, kejujuran dan moralitas yang bisa diterima semua kalangan. Dengan demikian akan terkikis perasaan terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian dari negara.⁴³

Pengembangan demokrasi yang lebih substantif sebagaimana dijelaskan di atas terlihat sebagai sarana pengimplementasian Islam sebagai rahmad bagi kehidupan. Hal ini terlihat dari program pendidikan perdamaian di kalangan pemuda muslim atau program *peace tech* yang dilaksanakan pada tahun 2010. Dari kegiatan tersebut terlihat Islam harus dijadikan sebagai spirit pemampuan manusia untuk menata diri secara maksimal dalam kehidupan yang plural. Dengan bahasa lain Islam harus dibumikan menjadi etika sosial di masyarakat.⁴⁴

Dengan pendidikan perdamaian yang dilaksanakan terlihat Pesantren Al Muayyad Windan terlihat berupaya menunjukkan wajah Islam yang pluralis. Pesantren Al Muayyad Windan terlihat hendak menegaskan pandangan bahwa Islam adalah rahmad pada kehidupan. Hal ini dicirikan *pertama*, sikap pluralis yang ditunjukkan oleh Pesantren Al Muayyad Windan dengan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan dialog antar umat beragama. *Kedua*, toleransi terhadap budaya lokal. Dalam hal ini Pesantren Al Muayyad Windan melihat bahwa budaya lokal yang ada di Surakarta merupakan kekayaan lokal yang sangat berharga, maka menggali kearifan lokal menjadi penting. *Ketiga*, penerimaan terhadap perkembangan sosial. Pesantren Al Muayyad Windan sangat akomodatif terhadap perkembangan sosial baik dalam ranah ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Keterbukaan ini ditunjukkan oleh Pesantren Al Muayyad Windan dengan mengadopsi pemikiran baru yang baik untuk penguatan proses pembelajaran di internal Pesantren dan membangun tata kehidupan damai di masyarakat Surakarta. Langkah Pesantren Al Muayyad Windan ini di dasarkan pada pandangan dasar bermasyarakat pesantren yaitu adanya *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyyah*.

Program pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh pesantren Al Muayyad tersebut diharapkan masyarakat akan terhindar dari sikap beragama yang formalis-ritualis, sebab sikap demikian hanya akan menyempitkan makna beragama dimana orang tidak akan peka lagi terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.⁴⁵

⁴³ Di sini masyarakat bisa berpartisipasi politik secara aktif dengan berbasis komunitas. Partisipasi politik didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penduduk yang bertujuan mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi ini muncul disebabkan sejumlah penduduk tertentu menyakini bahwa aspirasi mereka dapat dipenuhi atau setidaknya dihormati oleh pembuat keputusan dalam pengambilan kebijakan publik dan penerapannya. Lihat Masykuri Abdillah, "Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Demokrasi Dan Multicultural", dalam *Konflik Komunal*. hlm.173.

⁴⁴ Farid Esaac, *Al-Qur'an Liberation and Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 335

⁴⁵ Menurut Khaled Abou El-Fadl bahwa teks agama harus didekonstruksi dengan mengajukan paradigma tafsir yang menekankan pada aspek etika dari pada aspek legal-formal. Tafsir keagamaan harus

Sebagai gantinya pesantren Al Muayyad Windan memahami Islam dengan corak kritis-humanis terhadap realitas yang ada di tengah masyarakat.

Simpulan

Pesantren Al Muayyad Windan dan pendidikan perdamaian di Surakarta memberikan harapan baru, bahwa komunitas-komunitas tingkat lokal seperti pesantren, paguyuban-paguyuban, komunitas keluarga ternyata memiliki potensi yang besar dalam membangun kehidupan damai di masyarakat. Komunitas tersebut memainkan peran yang cukup signifikan dalam mendorong terjadinya transformasi konflik di masyarakat melalui serangkaian kegiatan yang terbingkai dalam pendidikan perdamaian.

Pendidikan perdamaian yang dilakukan di Pesantren Al Muayyad Windan merupakan prakarsa untuk meningkatkan keadilan dan menurunkan kekerasan di masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan adalah antara lain *pertama*, dialog antar agama baik pada tataran pembelajaran bersama maupun aksi bersama. *Kedua*, kajian sejarah kritis yang mendukung pemberdayaan rekonsiliasi. *Ketiga*, program pemberdayaan rekonsiliasi untuk mamampukan masyarakat terutama tokoh-tokoh dalam mengelola konflik dengan sebaik-baiknya tanpa kekerasan. *Keempat*, mencegah terjadinya pandangkalan agama dengan menitik beratkan keberagaman dari pada formalisme agama.

Model pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh pesantren Al Muayyad Windan ini bisa menjadi salah satu referensi peran serta komunitas dalam membangun perdamaian. Peran pesantren dalam melakukan pendidikan perdamaian merupakan sumbangan yang sangat berharga dalam pemajuan multikulturalisme di Indonesia, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia mengalami berbagai konflik social-keagamaan yang cukup memperhatikan.

diselamatkan dari berbagai tafsir yang bisa mendorong otoritarianisme. Dalam kerangka membangun tafsir keagamaan yang bersifat otoritatif inilah Khaled Abou El-Fadl menekankan pada lima hlm yaitu: pertama, kejujuran (*honesty*) dalam memandang mengungkapkan makna Al-Qur'an tidak hanya dari aspek tekstual semata, namun juga melihat dari keseluruhan ajaran tuhan melalui nabinya. *Kedua*, kesungguhan (*deligence*) dalam melakukan kajian tidak besifat subjektif, tetapi lebih menempatkan masalah secara komprehensif. *Ketiga*, kemenyeluruhan (*comprehensive*), melihat penafsiran dalam perspektif yang tunggal, melainkan beragama tafsir sebagai bentuk potensi yang akan mengarahkan pada tafsir fungsional dan transformatif. Keempat, kebijaksanaan dan kepantasan (*reasonableness*), rasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepantasan umum. Kelima, pengendalian diri (*self-restraint*). Lihat Khaled Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm.56

Rujukan

- Alamsyah, Andi Rahman (ed), *Pesantren Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi* Jakarta: Puslitbang Penda-Labsosio UI, 2009
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Dialektika Pesantren Dengan Tuntutan Zaman dalam Menggagas Pesantren Masa Depan; Geliat Suara Santri Untuk Indonesia Baru*, Yogyakarta: Qirtas, 2003.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Dinamika Radikalisme dan Konflik Bersentimen Keagamaan di Surakarta*, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) (10) November 2010:1
- Choir, Abu, "Model Pengembangan Kurikulum Terpadu di Pesantren Mahasiswa Al Muayyad Windan Sukoharjo", *Jurnal Al Hikmah*, Volume VII, Nomor 1 Juli 2009.
- Haedari, Amin, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2006.
- Kateregegga, Badru D. dan David W. Shenk, a *Muslim And Christian Dialogue* (terj) *Dialog Islam dan Kristen*, Semarang: Pustaka Muria, 2007.
- Kusumodilaga, Rusmiputra "Perpindahan Keraton Kartasura Ke Surakarta" dalam Suwita Santosa (ed). *Urip-urip*, Surakarta: Musium Radya Pustaka, 1990.
- Lederach, John Paul, *Conflict Transformation*, Intercourse: Good Books, 2003.
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta; LKiS, 1994.
- Markwood, *Mistisisme Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kesalehan Kebathinan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai System Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- MT.Arifin dkk, *Kapok Jadi Non Pribumi; Warga Tionghoa Mencari Keadilan*, Bandung: Zaman, 1998.

- Nafi, Dian, (dkk), *Praksis Pembelajaran Pesantren*, Yogyakarta: Forum Pesantren dan Institute For Taining and Development (ITD), 2007.
- NU Team, *Jejak Langkah NU Dari Masa Kemasa*, Jakarta: PT. Luna Kreasindo, 2006.
- Poitras, Jean and Pierre Renould, *Mediation and Reconciliation of Interest in Public Disputes*, Toronto: Carswell Thomson Professional Publishing, 1997.
- Rahman, Budhi Munawar, "Pluralism dan Dialog antar Agama; Paradigma Teologi Eksklusif, Inklusif dan Pluralis" Abdul Hakim dan Yudi Latif (Peny), *Bayang-Bayang Fanatisme; Esai-esai untuk Mengenang Nurcholis Madjid*, Jakarta: Paramadina, 2007.
- Sekilas Kurikulum Pondok Pesantren Al Muayyad Windan*, ditetapkan 23 Agustus 2007 M/10 Sya'ban 1428 H di Windan, Makamhaji Kartasura, Sukoharjo
- SPEK-HAM, FKPI, LSM COMMITMENT, *Draf Naskah Akademik Mekanisme Penanganan Kekerasan Berbasis Agama di Kota Surakarta*, Agustus 2010.
- ST. Sunardi, "Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog antar Agama" dalam Elga Sarapung (ed), *Dialog, Kritik Dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Institute DIAN/Interfidei, 2004.
- Swider, Leonard And Paul Mojzas, "From the Age Monologue to the Age of Global Dialogue" dalam *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Philadelphia: Temple University Press, 2000